

2	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	81.554.000	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	81.554.000		
3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 Laporan	57.079.000	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 Laporan	57.079.000		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	624.802.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	624.802.200		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda	100%	453.766.775	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda	100%	453.766.775		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	163.366.775	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	163.366.775	Sub Keg baru	
4	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	290.400.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	290.400.000		

	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota		Indeks Profesionalitas ASN Bapenda									
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen Kepegawaian Bapenda	100%	5.898.200	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		persentase capaian target pelaksanaan dan penyusunan dokumen Kepegawaian Bapenda	100%	5.898.200		
	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	3.973.200	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	3.973.200		
	monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapenda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.925.000	monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapenda	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.925.000		
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	10,69%	469.154.752	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	10,69%	469.154.752		
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Objek Pajak Baru	1,8	469.154.752	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Objek Pajak Baru	1,8	469.154.752		
1	Penyediaan saran dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5 unit	171.913.927	Penyediaan saran dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5 unit	171.913.927		
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 laporan	123.405.450	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 laporan	123.405.450		

3	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2 Laporan	21.316.050	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2 Laporan	21.316.050		
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	250000 Obyek Pajak	45.182.025	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	250000 Obyek Pajak	45.182.025		
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9 Dokumen	107.337.300	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9 Dokumen	107.337.300		
6												
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Tingkat kepatuhan wajib Pajak Daerah	2,00%	371.679.840	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Tingkat kepatuhan wajib Pajak Daerah	2,00%	371.679.840		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase tunggakan pajak daerah	2,00	371.679.840	Persentase tunggakan pajak daerah	Bapenda	Persentase tunggakan pajak daerah	2,00	371.679.840		
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 Laporan	92.268.015	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 Laporan	92.268.015		
2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Bapenda	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	121 layanan	44.514.750	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Bapenda	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	121 layanan	44.514.750		

4	Pembinaan dan Pengawasanj Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	17.830.575	Pembinaan dan Pengawasanj Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	17.830.575		
5	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	110.300.400	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Bapenda	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	110.300.400		

2.5 . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari musulan masyarakat yang mengusulkan melalui musrembang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat propinsi, atau berdasarkan proporsal program/kegiatan yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Untuk rencana kegiatan tahun 2026, sampai januari 2025 ini belum ada usulan program dan kegiatan/ sub kegiatan dari masyarakat atau instansi terkait lainnya. Berdasarkan hal ini , maka pengisian Tabekl TC.32

Tabel T-C . 32

Usulan program/Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun
2025 Kabupaten Sumbawa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

BAB III
TUJUAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga (Renja -KL) adalah dokumen perencanaan kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Tugas Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah khususnya urusan Keuangan bidang pendapatan daerah yang berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan'

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, mempunyai fungsi:

1. Perumusan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di b idang pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan Pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Berdasarkan Visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang sudah ditetapkan sebagai berikut “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera “

Berdasarkan visi tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah mendukung misi kedua yaitu Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul .

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 menetapkan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yaitu:

“ Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah”

Dari tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapenda.
3. Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas.

Secara rinci target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2026 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran	Indikator	2026	Keterangan
-Meningkatnya kualitas dan professional ASN dalam bertugas.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah(%)	3,437	
-Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.			2. Skor Hasil Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Angka)	82,81	
-Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah.			3. Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN(poin)	10,48	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapenda	Kategori AKIP PD	BB	

		Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas Bapenda	Kategori Indeks profesionalitas ASN PD	Tinggi	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Laju Pendapatan Asli Daerah	11,5	

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa 2025-2029 secara lengkap dirinci sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. Sedangkan Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

4.1. Uraian Program

Program merupakan kumpulan aktivitas nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa, serta memperhatikan arahan program yang tertuang pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, maka uraian program Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 (Program Prioritas Daerah diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah yang sesuai) sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Uraian program pada urusan pemerintahan Bidang Keuangan sebagai berikut:

Program pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan pendapatan daerah ini adalah kunci utama untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan di kabupaten Sumbawa. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan penerimaan daerah, baik dari pajak, retribusi, maupun sumber lainnya, secara efektif dan efisien

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber pajak yang sudah ada dan mencari sumber-sumber pajak baru.

- Intensifikasi Pajak: Melakukan penagihan secara lebih disiplin dan profesional, serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak. kegiatannya termasuk penyempurnaan basis data wajib pajak, penagihan aktif (door-to-door), dan pemberian sanksi bagi penunggak pajak.
- Ekstensifikasi Pajak: Mengidentifikasi potensi pajak baru yang belum tergarap, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah yang baru berkembang, atau jenis pajak lain yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ini juga mencakup edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang kewajiban pajak mereka.

2. Urusan Penunjang

Program pada urusan penunjang perangkat daerah adalah *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah program yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah (Badan Pendapatan Daerah) yang mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi umum hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah untuk merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang bersesuaian dengan uraian program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, serta IKU dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, maka uraian kegiatan disajikan pada Tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1 Program/Kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Nama Kegiatan: Kegiatan ini merupakan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi: Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/perubahan DPA, Pelaporan (LKjIP, laporan monev, laporan urusan pemerintahan, laporan lainnya) Lokasi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh unit Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Waktu Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun (2025-2029) Pihak yang Terlibat: Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu

		unit kerja bidang pada Badan Pendapatan Daerah Manfaat Kegiatan: Kegiatan ini bermanfaat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Badan Pendapatan Daerah setiap tahun. Teknis Pelaksanaan Kegiatan: Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Badan Pendapatan Daerah.
	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan PD	Nama Kegiatan: Kegiatan ini merupakan rangkaian proses administrasi keuangan perangkat daerah meliputi : penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran) Lokasi Kegiatan : Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Badan

		Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Waktu Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. Pihak yang Terlibat: Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa . Manfaat Kegiatan: Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi keuangan secara lancar dan akuntabel untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN serta pelaporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan). Teknis Pelaksanaan Kegiatan: Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
	5.02.01.2.03 Administrasi BMD pada PD	Nama Kegiatan: Kegiatan ini merupakan administrasi BMD perangkat daerah meliputi perencanaan kebutuhan BMD SKPD,

		rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD. Lokasi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Waktu Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. Pihak yang Terlibat: Dalam pelaksanaan kegiatan ini Melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa . Manfaat Kegiatan: Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi BMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Teknis Pelaksanaan Kegiatan: Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
	5.02.01.2.01.05 Administrasi Kepegawaian PD	Nama Kegiatan: Kegiatan ini merupakan Administrasi Kepegawaian .daerah meliputi pendataan dan pengolahan administrasi pegawai, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai serta Pendidikan

		dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Lokasi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Waktu Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. Pihak yang Terlibat: Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa . Manfaat Kegiatan: Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, dan monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Teknis Pelaksanaan Kegiatan: Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
	5.02.01.2.01.06 Administrasi Umum PD	Nama Kegiatan perangkat daerah meliputi penyediaan komponen instalasi

		listrik/penerangan bangunan kantor,penyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya dan penatausahaan arsip. Lokasi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Waktu Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Pihak yang Terlibat: Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Manfaat Kegiatan: Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan kunjungan tamu
--	--	--

		kedinasan, fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparaturnya dan penatausahaan kearsipan Teknis Pelaksanaan Kegiatan: Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa.
	5.02.01.2.01.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Nama Kegiatan: Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa penunjang urusan Pemda meliputi penyediaan jasa surat Menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor.. Lokasi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Waktu Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Pihak yang Terlibat: Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

		Manfaat Kegiatan: Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh penyediaan jasa surat masuk dan surat keluar, tersedianya sumber daya listrik , penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.. Teknis Pelaksanaan Kegiatan: Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
	5.02.01.2.01.09 Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Nama Kegiatan: Kegiatan ini merupakan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda meliputi penyediaan jasa pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasionalatau lapangan, pemeliharaan/rehabilitasi sarpras Gedung kantor atau bangunan lainnya.. Lokasi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Waktu Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. Pihak yang Terlibat:

		Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Manfaat Kegiatan: Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan jasa Pemeliharaann kendaraan operasional yang dipelihara serta pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor yang dipelihara.. Teknis Pelaksanaan Kegiatan: Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nama Kegiatan: Kegiatan ini merupakan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda meliputi Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lokasi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Waktu Pelaksanaan Kegiatan: